LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN

2025



BADAN LAYANAN UMUM

BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

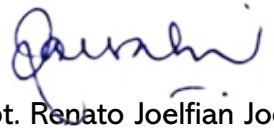
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2025 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah disusunnya LAKIP tahun anggaran 2025 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kesehatan Penerbangan dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan LAKIP di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Badan Layanan Umum
Balai Kesehatan Penerbangan



Capt. Renato Joelfian Joesaki
NIP. 19751106 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Ringkasan Eksekutif vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2
1.3 Sumber Daya Manusia 4
1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan 5
1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

2.1 Rencana Strategis 8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 12
2.3 Perjanjian Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 Capaian Kinerja 15
3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya 31
3.3 Realisasi Daya Serap 36

BAB IV PENUTUP 36

4.1 Kesimpulan 38
4.2 Saran dan Tindak Lanjut 38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 Balai Kesehatan Penerbangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung keselamatan dan keamanan transportasi udara. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan, Balai Kesehatan Penerbangan berperan strategis dalam pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas, profesional, cepat, dan adaptif. Penyusunan LAKIP ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berkontribusi terhadap sasaran strategis Kementerian Perhubungan dan RPJMN 2025–2029. Laporan ini menekankan peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan penerbangan untuk mewujudkan transportasi udara yang selamat, aman, dan sehat.

Pendahuluan dan Profil Organisasi

Balai Kesehatan Penerbangan memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan, serta pengujian lingkungan kerja. Fungsi utamanya mencakup:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta evaluasi;
2. Pemeriksaan dan pengujian kesehatan serta perawatan peralatan;
3. Pengelolaan pelayanan, kerjasama, pemasaran, dan sistem informasi kesehatan;
4. Pemeriksaan intern oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI).

Struktur organisasi terdiri dari Kepala Balai, Subbagian Keuangan dan Tata Usaha, Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan, Seksi Pelayanan dan Kerjasama, serta Dewan Pengawas.

Sumber daya manusia (SDM) Balai Kesehatan Penerbangan tahun 2025 terdiri dari 99 orang, dengan komposisi: Tenaga Medis (58 orang, 58%) termasuk PNS (48 orang) dan PPPK (10 orang); serta Tenaga Non-Medis (41 orang, 42%) termasuk PNS (32 orang). Dominasi tenaga medis mencerminkan fokus pada operasional kesehatan, sementara tenaga non-medis mendukung administrasi. Potensi dan isu strategis ke depan meliputi digitalisasi pelayanan (seperti platform digital dan otomatisasi proses), kemandirian finansial melalui diversifikasi pendapatan, serta keterbukaan dan kolaborasi dengan sektor swasta. Permasalahan utama mencakup transformasi BLU menjadi lebih mandiri, adaptasi teknologi, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik, dengan visi menjadi entitas efisien, inovatif, dan berorientasi hasil.

Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Balai Kesehatan Penerbangan tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, yang selaras dengan RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Perhubungan, dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Visi organisasi adalah

"Terwujudnya Personel Penerbangan yang sehat dan prima dalam mendukung transportasi udara yang aman dan selamat serta turut mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup tinggi melalui sistem kesehatan yang tangguh, inovatif dan berteknologi digital".

Misi mencakup tujuh poin utama, yaitu

1. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan secara profesional sesuai standar penerbangan nasional dan internasional untuk menjamin kondisi kesehatan dan kesiapan prima demi terwujudnya transportasi udara yang aman dan selamat;
2. Memperkuat sistem kesehatan penerbangan yang tangguh dan responsif terhadap tantangan keselamatan dan keamanan transportasi udara;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan serta pemeliharaan kesehatan, Pengujian Lingkungan Kerja Personel Penerbangan;
4. Mendorong inovasi dan penerapan teknologi digital dalam pelayanan dan manajemen kesehatan penerbangan;
5. Menjalin kerja sama dan kemitraan strategis dengan instansi, lembaga riset, dan sektor swasta dalam pengembangan kesehatan penerbangan;
6. Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja SDM kesehatan penerbangan melalui pengembangan berkelanjutan.
7. Berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas tinggi melalui kontribusi sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran kegiatan terdiri dari tiga aspek:

1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) meliputi:

1. Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang diterbitkan
2. Personel Penerbangan yang dilakukan pengujian narkoba di daerah lingkungan kerja
3. Pengujian lingkungan kerja personel penerbangan di lingkungan kerja.
4. Pemahaman kesehatan penerbangan oleh pengguna jasa

5. Jumlah Peralatan Pengujian yang dikalibrasi
6. Kepuasan pengguna jasa
7. Keluhan pengguna jasa yang ditindak lanjuti
8. Skala nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pengujian kesehatan
9. Skala nilai rata-rata yang dibutuhkan dalam evaluasi rekam medis sampai dengan penerbitan sertifikat
10. Pemenuhan Sumber Daya Manusia
11. Sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
12. Jumlah pendapatan BLU
13. Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 menjabarkan Renstra dengan target spesifik, seperti 100% untuk sebagian besar indikator operasional dan Rp45,312.830.000 untuk pendapatan BLU. Perjanjian Kinerja (PK) dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara memperjelas target kinerja berdasarkan pagu definitif/DIPA, memastikan akuntabilitas dan penggunaan sumber daya yang efisien.

Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan progres positif, meskipun dengan fluktuasi. Pada sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara, sertifikat kesehatan diterbitkan mencapai 83,92% (realisasi 22.010 unit dari target 100%), dengan puncak di Januari (2.416 unit) dan terendah di Mei (1.372 unit). Pengujian narkoba mencapai 150,66% (7.433 personel), dengan lonjakan di Mei (886) dan penurunan di Desember (404). Pengujian lingkungan kerja 100% (12 lokasi), pemahaman kesehatan pengguna jasa 97,51% (rata-rata 92,64%), dan kalibrasi peralatan 100%.
2. Untuk sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan, indeks kepuasan pengguna jasa 100,91% (rata-rata 94,86%), dengan puncak di Januari (95,33%). Keluhan ditindaklanjuti 100%, skala waktu pemeriksaan 98,95% (rata-rata 0,94), dan skala waktu evaluasi rekam medis 98,60% (rata-rata 0,94). Sasaran ini didukung oleh infrastruktur TI dan konsep one day service.
3. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, pemenuhan SDM 100%, SDM mengikuti pelatihan 100%, pendapatan BLU 92,61% (Rp41,964 miliar dari target Rp45,312 miliar), dan pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 99,29% (84,40% dari 85%).

Analisis efisiensi sumber daya menunjukkan penggunaan anggaran yang akuntabel, dengan fokus pada value for money dan pengendalian internal melalui SPIP.

Realisasi penyerapan anggaran mencapai 80,11% dari total pagu Rp67.939.273.000, dengan realisasi Rp54.424.148.598. Sumber RM (Rp21.527.924.000) terserap 69,35% (Rp14.928.947.096), sementara BLU (Rp46.411.349.000) mencapai 85,10% (Rp39.495.201.502), termasuk belanja modal Rp3.200.000.000 dengan realisasi 97,61%. Komposisi belanja: barang 82% (Rp55.316.700.000), modal 10% (Rp6.906.497.000), pegawai 8% (Rp5.716.076.000). Ketimpangan antara RM dan BLU menjadi catatan, dengan risiko sisa anggaran pada RM sekitar Rp6,6 miliar.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap unit pelaksana teknis diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Balai Kesehatan Penerbangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari APBN, sekaligus sebagai instrumen evaluasi kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Balai Kesehatan Penerbangan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung keselamatan dan keamanan transportasi udara melalui penyelenggaraan layanan kesehatan penerbangan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, profesional, cepat, dan adaptif semakin tinggi, sejalan dengan dinamika perkembangan transportasi udara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, LAKIP disusun tidak hanya sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menilai sejauh mana visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi dapat tercapai.

Selain itu, penyusunan LAKIP selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Melalui LAKIP, Balai Kesehatan Penerbangan dapat mengidentifikasi capaian kinerja, hambatan, serta peluang perbaikan yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Penyusunan LAKIP juga menjadi wujud komitmen Balai Kesehatan Penerbangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan dan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, memperkuat budaya kinerja di lingkungan instansi, serta mendorong peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan penerbangan.

Secara keseluruhan, latar belakang penyusunan LAKIP Balai Kesehatan Penerbangan bertumpu pada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi,

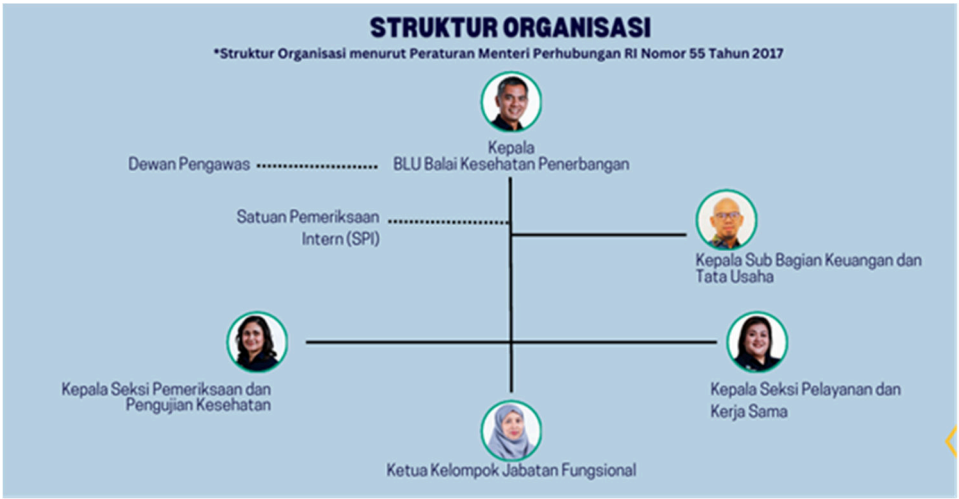
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan penerbangan. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan organisasi yang lebih adaptif, responsif, serta berorientasi pada hasil, guna mendukung tercapainya transportasi udara yang selamat, aman, dan sehat.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017,Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, rencana strategis bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan dan tata kelola, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, tata usaha serta penyusunan evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan dan pengujian lingkungan kerja personel penerbangan serta perawatan /kalibrasi peralatan dan fasilitas pengujian kesehatan;
3. Penyiapan bahan pengelolaan pelayanan, kerjasama, pemasaran dan promosi kesehatan serta sistem informasi manajemen kesehatan personel penerbangan; dan
4. Pelaksanaan pemeriksaan intern

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan, maka susunan organisasi Balai Kesehatan Penerbangan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Kesehatan Penerbangan

Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan, telah ditetapkan susunan Organisasi Balai Kesehatan Penerbangan berserta fungsinya sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha

   Subbagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, rencana strategis bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan dan tata kelola, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, persuratan dan kearsipan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan

   Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan dan pengujian lingkungan kerja personel penerbangan serta perawatan/kalibrasi peralatan dan fasilitas pengujian Kesehatan.

3. Seksi Pelayanan dan Kerja sama Seksi Pelayanan dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan, kerjasama, pemasaran dan promosi kesehatan serta sistem informasi manajemen kesehatan personel penerbangan

4. Satuan Pemeriksa Intern (SPI), merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Dewan Pengawas Balai Kesehatan Penerbangan.

   Dewan Pengawas bertugas :

   a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum yang meliputi Pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran, Rencana Strategis Bisnis sesuai ketentuan perundang-undangan.
   b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU.
   c. Mengikuti perkembangan kegiatan dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU.
   d. Memberikan laporan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU.
   e. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Balai Kesehatan Penerbangan. Jumlah SDM Balai Kesehatan Penerbangan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2025 pada triwulan dua tercatat sebanyak 100 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Balai Kesehatan Penerbangan

No	Jenis Pegawai	Jumlah
A	**PNS**	
1	Tenaga Medis	16
	a. Dokter Spesialis	5
	b. Dokter Umum	8
	c. Dokter Gigi	3
2	Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	32
	a. Keperawatan	19
	b. Tenaga kesehatan lainnya	13
3	Tenaga Non Medis	32
	Jumlah PNS	**80**
B	**PPPK**	
	1. Dokter Spesialis	2
	2. Dokter Gigi	3
	3. Tenaga kesehatan lainnya	5
	4. Non Medis	9
	Jumlah NON PNS	**19**
	Jumlah Seluruh Pegawai	**99**

Berdasarkan tabel di atas:

Total pegawai berjumlah 100 orang, terdiri dari:

a. 80 PNS (81%)

b. 19 PPPK (19%)

c. Komposisi ini menunjukkan dominasi PNS sebagai tenaga inti di Balai Kesehatan Penerbangan.

1. Tenaga Medis (PNS dan PPPK)
    a. Dokter spesialis: 7 orang (5 PNS, 2 PPPK)
    b. Dokter umum: 8 orang (PNS)
    c. Dokter gigi: 6 orang (3 PNS, 3 PPPK)
    d. Keperawatan: 19
    e. Tenaga Kesehatan lainnya: 18 orang (13 PNS, 5 PPPK)

2. Tenaga Non Medis
    a. PNS: 33 orang
    b. PPPK: 9 orang
3. Tenaga medis mendominasi jumlah pegawai, hal ini menunjukkan bahwa dukungan operasional dan tenaga kesehatan inti lebih besar dibanding tenaga administrasi.
4. Jumlah tenaga medis (58%) dan tenaga non medis (42%) juga menunjukkan ketersediaan sumber daya kesehatan yang cukup untuk menunjang layanan.

1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Badan Layanan Umum (BLU) di masa depan diperkirakan akan mengalami transformasi signifikan, beradaptasi dengan tuntutan global, teknologi, dan harapan publik yang terus berkembang. Konsep BLU yang fleksibel dan berorientasi pada pelayanan akan diperkuat untuk menjadi entitas yang lebih mandiri, efisien, dan inovatif.

Berikut adalah beberapa isu utama yang akan membentuk masa depan BLU:

1. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan

   Ini adalah tren terbesar yang akan mengubah cara kerja BLU. Di masa depan, BLU tidak hanya akan mengadopsi teknologi, tetapi menjadikannya sebagai inti dari operasional mereka.

   Contohnya:

   a. Pelayanan Digital Terpadu: BLU akan menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan, mendaftar, membayar, dan memantau status secara real-time. Contohnya, rumah sakit BLU akan memiliki aplikasi telemedisin dan jadwal dokter online.
   b. Otomatisasi Proses: Tugas-tugas administratif yang berulang akan diotomatisasi dengan sistem informasi, membebaskan staf untuk fokus pada pelayanan yang lebih kompleks dan interaksi dengan masyarakat.
   c. Analisis Data: BLU akan memanfaatkan big data dan analisis prediktif untuk memahami kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

2. Kemandirian Finansial dan Praktik Bisnis Sehat

   Fleksibilitas keuangan yang menjadi ciri khas BLU akan semakin didorong. Di masa depan, BLU diharapkan bisa menjadi lebih mandiri dari APBN, dengan pendapatan dari layanannya sebagai sumber pembiayaan utama.

a. Diversifikasi Pendapatan: BLU akan didorong untuk mengembangkan model bisnis yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada satu jenis layanan. Misalnya, lembaga pendidikan BLU dapat menawarkan program pelatihan, konsultasi, atau kerja sama riset dengan sektor swasta.
b. Manajemen Aset yang Optimal: Pengelolaan aset, termasuk tanah dan bangunan, akan dilakukan secara lebih profesional untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pendapatan tambahan.
c. Tata Kelola ala Korporasi: Meskipun tidak berorientasi profit, BLU akan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang efektif.

3. Keterbukaan dan Kolaborasi

BLU tidak akan lagi beroperasi sendirian. Masa depan BLU akan ditandai dengan kolaborasi yang lebih erat dan keterbukaan kepada publik.

a. Kemitraan Strategis: BLU akan lebih aktif menjalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga riset, dan komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat inovasi.
b. Responsif terhadap Kebutuhan Publik: BLU akan menjadi lebih proaktif dalam mendengarkan masukan masyarakat dan menyesuaikan layanannya sesuai dengan perubahan tren dan kebutuhan.
c. Transparansi: Laporan keuangan dan kinerja BLU akan semakin mudah diakses oleh publik, menunjukkan pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan dana dan layanan yang diberikan.

Balai Kesehatan Penerbangan di masa mendatang akan mengalami transformasi signifikan, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, perubahan regulasi, dan tuntutan efisiensi. Perkembangan ini akan membentuk Balai Kesehatan Penerbangan menjadi satker BLU yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan penerbangan melalui pendekatan kesehatan yang proaktif, didukung oleh teknologi canggih dan komitmen pada standar tertinggi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**

   Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Balai Kesehatan Penerbangan dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued).

2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**

   Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis, Prioritas Nasional, Rencana Kerja, dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

   Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi pada tahun yang bersangkutan terdiri dari:

   a. Analisis Capaian Kinerja Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun berjalan berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.
   b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
   c. Capaian Keberhasilan Kinerja Balai Kesehatan Penerbangan
   d. Realisasi Anggaran Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.

4. **Bab IV-Penutup**

   Bab ini menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Balai Kesehatan Penerbangan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. **Lampiran**

   Menyajikan lampiran yang mendukung Laporan Kinerja Balai Kesehatan Penerbangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya melalui perencanaan strategis yang jelas. Dokumen Rencana Strategis Balai Kesehatan Penerbangan menjadi pedoman dan komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan strategis serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan. Rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan.

Rencana Strategis Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Balai Kesehatan Penerbangan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (RPJM Nasional 2025–2029) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, Perkembangan IPTEK dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025-2029.

Didasarkan pada hal tersebut , maka ditetapkan Visi Balai Kesehatan Penerbangan sebagai berikut;

“Terwujudnya Personel Penerbangan yang sehat dan prima dalam mendukung transportasi udara yang aman dan selamat serta turut mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup tinggi melalui sistem kesehatan yang tangguh, inovatif dan berteknologi digital”.

Penyelenggaraan serangkaian pelayanan pemeriksaan dan pengujian Kesehatan yang berkualitas, antisipatif dan responsif merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan dan mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Balai Kesehatan Penerbangan ditetapkan Misi Balai Kesehatan Penerbangan, sebagai berikut:

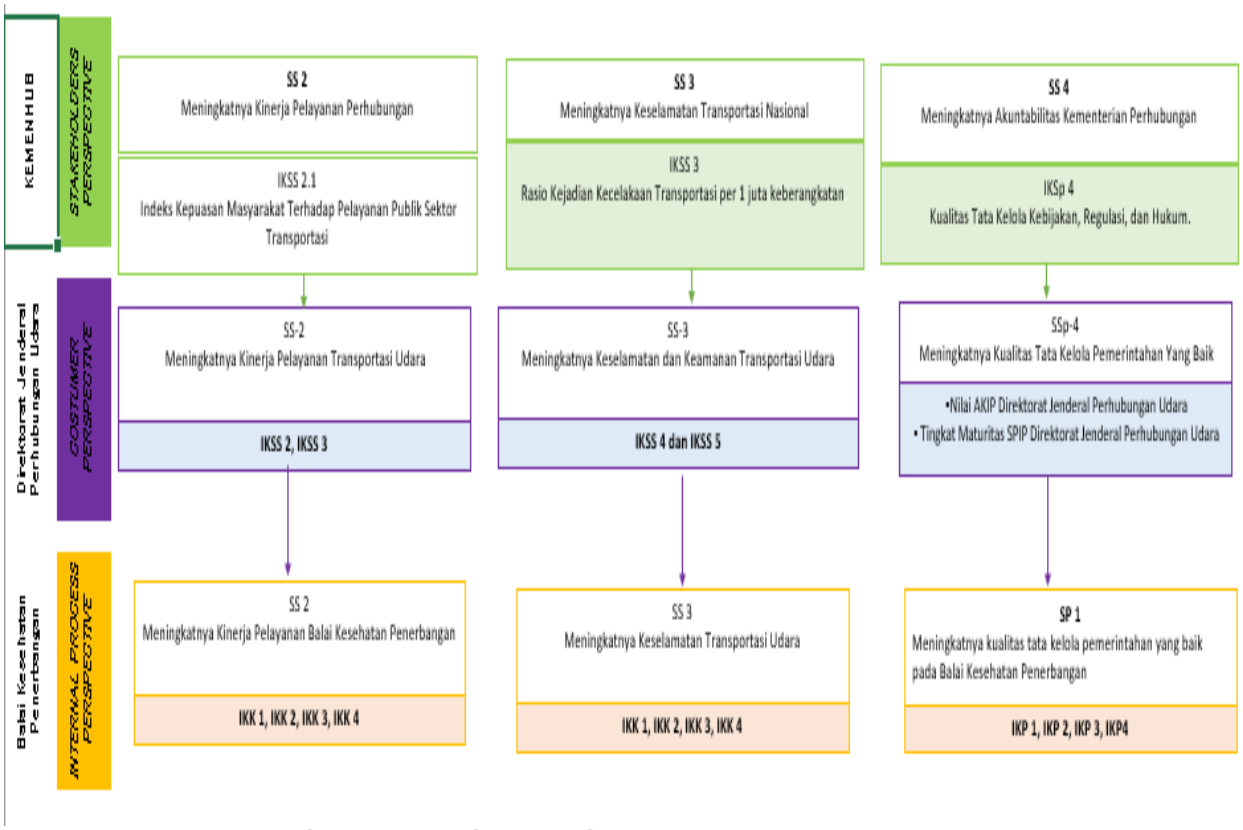
1. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan secara profesional sesuai standar penerbangan nasional dan internasional untuk menjamin kondisi kesehatan dan kesiapan prima demi terwujudnya transportasi udara yang aman dan selamat;
2. Memperkuat sistem kesehatan penerbangan yang tangguh dan responsif terhadap tantangan keselamatan dan keamanan transportasi udara;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan serta pemeliharaan kesehatan, Pengujian Lingkungan Kerja Personel Penerbangan;
4. Mendorong inovasi dan penerapan teknologi digital dalam pelayanan dan manajemen kesehatan penerbangan;
5. Menjalin kerja sama dan kemitraan strategis dengan instansi, lembaga riset, dan sektor swasta dalam pengembangan kesehatan penerbangan;
6. Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja SDM kesehatan penerbangan melalui pengembangan berkelanjutan.
7. Berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas tinggi melalui kontribusi sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Balai Kesehatan Penerbangan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Balai Kesehatan Penerbangan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu, untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran kegiatannya, setiap sasaran yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan Sasaran Kegiatan Balai Kesehatan Penerbangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan
3. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan.

Sasaran strategis Balai Kesehatan Penerbangan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran strategis Balai Kesehatan Penerbangan dan memperhatikan permasalahan dan capaian pada tahun 2020-2024 serta menjabarkan misi Balai Kesehatan Penerbangan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective, costumer perspective, internal proses perspective, dan learning and growth perspective* sebagai berikut:



Gambar 2.1 Sasaran Strategis Balai Kesehatan Penerbangan

Secara rinci penjabaran indikator kinerja berikut targetnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan yang diterbitkan	Persentase	94	95	96	97	98
Personil Penerbangan yang dilakukan Pengujian Narkoba di daerah lingkungan kerja	Persentase	92	93	94	95	96
Pengujian lingkungan kerja personel penerbangan di lingkungan kerja.	Persentase	85	87	90	92	94
Pemahaman kesehatan penerbangan oleh pengguna jasa	Persentase	90	90	92	95	95
Jumlah peralatan pengujian yang dikalibrasi	Persentase	100	100	100	100	100
Indeks kepuasan pengguna jasa	Persentase	94	94	96	97	98
Keluhan pengguna jasa yang ditindak lanjuti	Persentase	100	100	100	100	100
Skala nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pengujian kesehatan	Skala	0,94	0,95	0.96	0.97	0.98
Skala nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam evaluasi rekam medis sampai dengan penerbitan sertifikat	Skala	0,94	0,95	0.96	0.97	0.98
Pemenuhan sumber daya manusia	Persentase	87	88	89	90	92
Sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	85	87	90	92	94
Jumlah pendapatan BLU	Rupiah	45.312.830.000	45.579.340.000	45.951.130.000	46.492.480.000	47.199.730.000
Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	Persentase	85	86	87	89	89

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2025- 2029, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengerahan sumber daya, terutama anggaran.



RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara	1	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang diterbitkan	Persentase	100
		2	Personel Penerbangan yang dilakukan pengujian narkoba.	Persentase	100
		3	Pengujian lingkungan kerja personel penerbangan di lingkungan kerja	Persentase	100
		4	Pemahaman Keselatan Penerbangan oleh Pengguna Jasa	Persentase	95
		5	Jumlah Peralatan Pengujian yang dikalibrasi	Persentase	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan	1	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	Persentase	94
		2	Keluhan pengguna jasa yang ditindak lanjuti	Persentase	100
		3	Skala nilai rata-rata Waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pengujian kesehatan	Skala	0.95
		4	Skala nilai rata-rata yang dibutuhkan dalam evaluasi rekam medis sampai dengan penerbitan sertifikat	Skala	0.95
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan	1	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia	Persentase	100
		2	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase	100
		3	Jumlah Pendapatan BLU	Rupiah	45.332.850.000
		4	Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	Persentase	85

Jakarta, Januari 2025
Kepala UPT Balai Kesehatan Penerbangan

Capt. RENATO JOELFIAN JOESAAT
NIP. 19751106 200012 1 001

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA).

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara	1	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang diterbitkan	Persentase	100
		2	Personel Penerbangan yang dilakukan pengujian narkoba.	Persentase	100
		3	Pengujian lingkungan kerja personel penerbangan di lingkungan kerja	Persentase	100
		4	Pemahaman Kesehatan Penerbangan oleh Pengguna Jasa	Persentase	95
		5	Jumlah Peralatan Pengujian yang dikalibrasi	Persentase	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan	1	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	Persentase	94
		2	Keluhan pengguna jasa yang ditindak lanjuti	Persentase	100
		3	Skala nilai rata-rata Waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pengujian kesehatan	Skala	0.95
		4	Skala nilai rata-rata yang dibutuhkan dalam evaluasi rekam medis sampai dengan penerbitan sertifikat	Skala	0.95
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan	1	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia	Persentase	100
		2	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase	100
		3	Jumlah Pendapatan BLU	Rupiah	45.312.830.000
		4	Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	Persentase	85

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{(2\text{xTarget}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Progam	IKK BLU Balai Kesehatan Penerbangan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang diterbitkan	100,00%	83,92%	83,92%
	Personel Penerbangan yang dilakukan pengujian narkoba di daerah lingkungan kerja.	100,00%	150,66%	150,66%
	Pengujian lingkungan kerja personel penerbangan di lingkungan kerja	100,00%	100,00%	100,00%
	Pemahaman kesehatan penerbangan oleh pengguna jasa	95,00%	92,64%	97,51%
	Jumlah Peralatan Pengujian yang dikalibrasi	100,00%	100,00%	100,00%

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan	Kepuasan pengguna jasa	94,00%	94,86%	100,91%
	Keluhan pengguna jasa yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	100,00%
	Skala nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pengujian kesehatan	0,95	0,94	98,95%
	Skala nilai rata-rata yang dibutuhkan dalam evaluasi rekam medis sampai dengan penerbitan sertifikat	0,95	0,94	98,60%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan	Pemenuhan Sumber Daya Manusia	100%	100,00%	100,00%
	Sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100,00%	100,00%
	Jumlah pendapatan BLU	45.312.830.000	41.964.045.194	92,61%
	Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	85,00%	84,40%	99,29%

1. **Sasaran "Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara"**

   Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara didukung oleh program sebagai berikut:

   a. Pemeriksaan Kesehatan Personel Penerbangan, Pemeriksaan berkala bagi pilot, awak kabin, ATC, teknisi, dan personel terkait.Penerbitan sertifikat kesehatan penerbangan sesuai regulasi internasional (ICAO, DGCA).
   b. Pengawasan dan Monitoring Kesehatan, Pengendalian penggunaan zat adiktif bagi personel penerbangan.
   c. Program fatigue management (manajemen kelelahan).
   d. Pemantauan kondisi psikologis dan mental health screening.
   e. Pengendalian Faktor Lingkungan kerja Penerbangan dan Pemeriksaan kualitas udara, Pengendalian kebisingan dan getaran yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja penerbangan.
   f. Pelatihan & Edukasi Kesehatan Penerbangan
   g. Pelatihan Aviation Medicine untuk dokter pemeriksa.
   h. Sosialisasi kesehatan dan keselamatan bagi awak pesawat dan petugas darat.

   Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

A. Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan yang diterbitkan.



Grafik 3.1 Capaian Realisasi Jumlah Penerbitan Sertifikat

Sertifikat kesehatan merupakan dokumen wajib bagi personel penerbangan seperti pilot (kelas 1 untuk transport pilot dan commercial pilot), awak pesawat (flight attendant), pengendali lalu lintas udara (air traffic controller), teknisi perawatan pesawat, dan personel pendukung lainnya (kelas 2 dan 3), sesuai standar ICAO serta regulasi nasional seperti Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan Dirjen Hubud. Pemeriksaan kesehatan ini bersifat periodik (misalnya, kelas 1 berlaku 6-12 bulan tergantung usia, kelas 2 hingga 12 bulan), sehingga penerbitan sertifikat mengikuti siklus renewal, medical examination (madex), dan pengujian ulang (medical flight test jika diperlukan). Fluktuasi bulanan mencerminkan dinamika operasional sektor penerbangan, termasuk jadwal pemeriksaan rutin, masa berlaku sertifikat yang habis, serta faktor eksternal seperti musim tinggi/rendah penerbangan, penyesuaian regulasi, atau tantangan akses layanan kesehatan penerbangan.

Dalam upaya menjaga keselamatan penerbangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 2017 dan komitmen terhadap standar internasional ICAO, data jumlah sertifikat pemeriksaan kesehatan personel penerbangan tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang fluktuatif namun tetap mendukung kelangsungan operasi angkutan udara yang aman dan berkelanjutan. Total sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun mencapai 22.010 unit, dengan rata-rata bulanan sekitar 1.834 unit, mencerminkan volume personel aktif yang memerlukan pemeliharaan kesehatan secara berkala untuk memenuhi persyaratan lisensi dan operasional.

Pada triwulan pertama (Januari–Maret), terdapat tren penurunan dari 2.416 unit di Januari menjadi 2.139 unit di Maret. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian pasca-libur akhir tahun, di mana banyak personel memperpanjang sertifikat pada akhir tahun sebelumnya, serta proses administrasi awal tahun yang memerlukan koordinasi lebih intensif antara Balai Kesehatan Penerbangan, dokter penguji berizin, dan operator penerbangan. Hal ini menuntut penguatan monitoring dini agar tidak mengganggu ketersediaan personel kritis seperti pilot dan *air traffic controller.*

Memasuki kuartal kedua, terjadi penurunan signifikan hingga mencapai titik terendah 1.372 unit pada Mei, diikuti pemulihan ringan pada Juni (1.386). Fluktuasi tajam ini dapat diatribusikan pada faktor musiman, seperti periode evaluasi regulasi, atau dampak pemulihan pasca-aktivitas tinggi di awal tahun.

Pada paruh kedua tahun, pola bergantian berlanjut: penurunan pada Agustus–September (1.541 unit), kemudian peningkatan kembali pada Oktober–November dengan puncak 2.248 unit di November. Lonjakan akhir tahun ini mencerminkan akselerasi program renewal sertifikat menjelang penutupan tahun fiskal dan persiapan operasional peak season (libur akhir tahun serta mudik), sejalan dengan upaya pemerintah memastikan kesiapan personel untuk mendukung target pertumbuhan sektor penerbangan nasional. Namun, penurunan pada Desember (1.603 unit) kemungkinan dipengaruhi oleh faktor libur nasional, penutupan administrasi, dan prioritas pada penilaian keselamatan akhir tahun, yang memerlukan strategi mitigasi seperti perpanjangan jam layanan atau digitalisasi lebih lanjut.

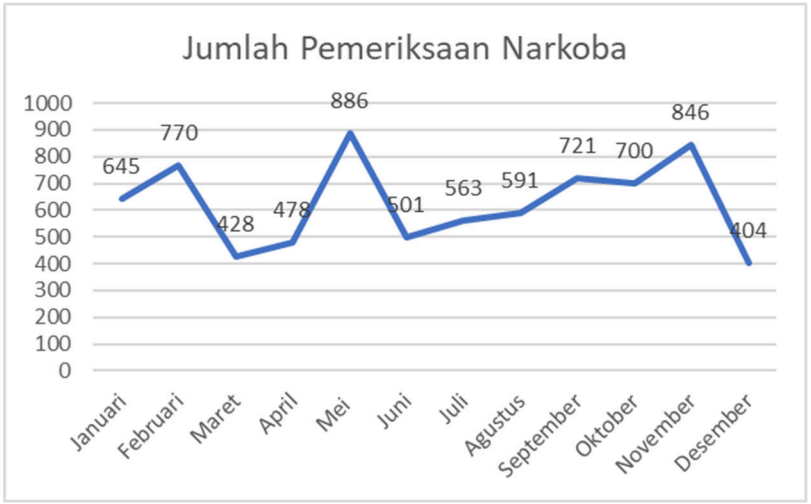
Secara keseluruhan, variasi tinggi (standar deviasi sekitar 352 unit) menegaskan perlunya penguatan sistem prediksi dan monitoring berbasis data di Balai Kesehatan Penerbangan serta Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Pencapaian total 22.010 sertifikat ini mendukung visi keselamatan penerbangan yang inklusif, dengan rekomendasi ke depan meliputi: percepatan transformasi digital pelayanan sertifikat kesehatan, peningkatan kapasitas fasilitas pemeriksaan, serta kolaborasi lintas-stakeholder (maskapai, asosiasi pilot, dan lembaga pelatihan) guna menstabilkan tren dan memenuhi target indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMN serta komitmen keselamatan penerbangan nasional. Dengan demikian, upaya ini terus berkontribusi pada terwujudnya

Indonesia sebagai negara dengan penerbangan yang aman, efisien, dan berdaya saing global.

B. Personil Penerbangan yang dilakukan Pengujian Narkoba di daerah

Balai Kesehatan Penerbangan, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memainkan peran sentral dalam menjalankan indikator kinerja kegiatan berupa pemeriksaan narkoba bagi personel penerbangan, termasuk pilot, awak kabin, *air traffic controller*, dan teknisi pesawat, melalui mekanisme tes urine acak (*Rapid Urine Napza/RUN*) yang dilakukan secara periodik dan mendadak, khususnya selama periode operasional tinggi seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) atau arus mudik.

Kegiatan ini tidak hanya merupakan bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan personel penerbangan, tetapi juga bagian integral dari program keselamatan penerbangan sipil nasional yang bertujuan memastikan seluruh personel berada dalam kondisi prima, bebas dari pengaruh zat adiktif yang dapat mengganggu konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kinerja operasional, sehingga secara langsung mengurangi potensi *human error* sebagai faktor utama kecelakaan penerbangan.



Grafik 3.2 Capaian Realisasi Jumlah Personil Penerbangan yang dilakukan Pengujian Narkoba

Grafik di atas menampilkan fluktuasi bulanan jumlah pemeriksaan yang dilakukan secara periodik, acak, dan mendadak, mencakup pilot, awak kabin, pengendali lalu lintas udara, teknisi pesawat, serta personel pendukung lainnya.

Total pemeriksaan narkoba sepanjang tahun mencapai 7.433 personel, dengan rata-rata bulanan sekitar 619 personel dan variasi yang cukup

signifikan dengan titik tertinggi di Bulan Mei sebesar 886 dan terendah di Bulan Desember 404.

Pada triwulan pertama, terjadi peningkatan awal dari 645 di Januari menjadi 770 di Februari, diikuti penurunan tajam ke 428 di Maret. Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian pasca-libur akhir tahun dan prioritas pada pemeriksaan kesehatan rutin lainnya, sehingga memerlukan koordinasi lebih baik untuk menjaga konsistensi pelaksanaan tes acak. Memasuki kuartal kedua, terdapat lonjakan signifikan pada Mei mencapai 886 pemeriksaan, yang menunjukkan keberhasilan intensifikasi program, mungkin melalui kampanye pencegahan narkoba, serta kolaborasi dengan operator penerbangan dan stakeholder terkait, sejalan dengan arahan untuk memperkuat pengawasan menjelang periode operasional tinggi.

Pada paruh kedua tahun, pola fluktuatif berlanjut dengan tren naik bertahap dari Juni (501) hingga November (846), mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga momentum pencegahan, terutama pada Oktober–November yang bertepatan dengan persiapan peak season akhir tahun seperti libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan ini mendukung target pengurangan risiko human error akibat zat adiktif, yang secara langsung berkontribusi terhadap penurunan rasio kecelakaan transportasi udara dan peningkatan On-Time Performance (OTP) nasional. Namun, penurunan drastis pada Desember (404) kemungkinan disebabkan oleh faktor musiman seperti libur nasional, penutupan administrasi akhir tahun, serta fokus pada evaluasi dan pelaporan kinerja, yang memerlukan strategi mitigasi seperti penjadwalan tes prioritas atau optimalisasi sumber daya untuk menjaga cakupan minimal.

Secara keseluruhan, pencapaian total 7.433 pemeriksaan narkoba tahun 2025 menegaskan dedikasi Balai Kesehatan Penerbangan dalam mewujudkan transportasi udara yang aman, aman, dan bebas narkoba. Upaya ini tidak hanya mendukung sasaran strategis peningkatan keselamatan transportasi udara, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas-sektor guna menjaga kedaulatan udara nasional, melindungi keselamatan penumpang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas udara yang handal dan berkelanjutan.

C. Pengujian Lingkungan Kerja Personil Penerbangan di Lingkungan Kerja

Balai Kesehatan Penerbangan, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan, serta pengujian lingkungan kerja personel penerbangan. Hal ini tercantum dalam tugas dan fungsi Balai Kesehatan Penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan, serta visi dan misi institusi yang menekankan pemenuhan standar pelayanan, pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan beserta kesehatan lingkungan kerja personel penerbangan.

Pengujian lingkungan kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan tempat kerja personel penerbangan (seperti kokpit pesawat, ruang kontrol lalu lintas udara, hanggar perawatan pesawat, dan fasilitas bandara) tetap aman, sehat, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Pengujian ini mendukung keselamatan penerbangan secara keseluruhan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja personel, sesuai dengan standar internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*) serta regulasi nasional di bidang kesehatan penerbangan. Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja personel penerbangan dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Penerbangan sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang pada PM No.55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan Pasal 3 Poin b. Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja personil penerbangan dilaksanakan oleh personil sanitarian dari Balai Kesehatan Penerbangan yang meliputi pemeriksaan kualitas udara, pencahayaan, kebisingan, kebersihan, sampah, pemeriksaan air, alat pelindung diri, serta psikologi kerja.

Tabel 3.2 Pelaksanaan Pengujian Lingkungan Kerja

No.	Tujuan	Pelaksanaan
1	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Januari 2025
2	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Februari 2025
3	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Maret 2025
4	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	April 2025
5	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Mei 2025
6	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Juni 2025

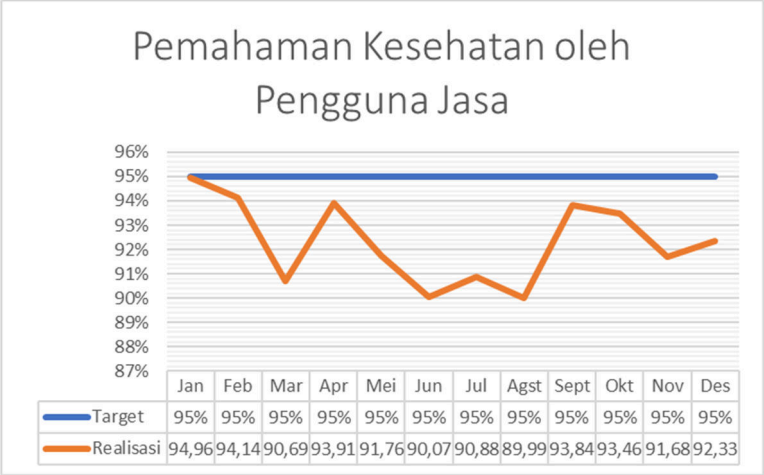
7	UPBU Tunggul Wulung, Cilacap	7-9 Juli 2025
8	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Agustus 2025
9	Balai Besar Kalibrasi dan Fasilitas Penerbangan	21-22 November 2025
10	UPBU H.Asan, Sampit-Kalimantan Tengah	24-25 November 2025
11	UPBU H.Kuala Pembuang, Seruyan-Kalimantan Tengah	26-27 November 2025
12	BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Desember 2025

Tahun 2025 Balai Kesehatan Penerbangan menargetkan 12 tempat yang akan dilakukan pengujian lingkungan kerja, di akhir tahun 2025 realisasi pelaksanaan pengujian lingkungan kerja mencapai 100%.

D. Pemahaman Kesehatan Penerbangan oleh Pengguna Jasa

Fungsi pemahaman kesehatan personil penerbangan bagi penerbangan di Indonesia sangat penting dan berperan dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Pemahaman kesehatan yang baik membantu mencegah penyebaran penyakit menular dan mengurangi risiko kesehatan selama penerbangan, sehingga menjaga keselamatan seluruh penumpang dan personil.
2. Meningkatkan Kinerja dan Efektivitas Personil Penerbangan Personil penerbangan yang memahami aspek kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, termasuk melakukan pertolongan pertama dan mengelola situasi darurat kesehatan di pesawat.
3. Mematuhi Regulasi dan Standar Kesehatan Internasional serta Nasional Pemahaman ini membantu penerbangan Indonesia untuk patuh terhadap regulasi dari otoritas penerbangan dan kesehatan, seperti ICAO, ICA, dan Kementerian Kesehatan.
4. Mengurangi Risiko Penyebaran Penyakit Menular Pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular dapat meminimalisasi risiko wabah, terutama dalam situasi pandemi atau penyakit yang mudah menular secara *airborne*.
5. Meningkatkan Kepercayaan Penumpang Penumpang merasa lebih aman dan nyaman jika mereka tahu bahwa petugas dan awak kabin memahami dan menerapkan prosedur kesehatan yang tepat.
6. Mendukung Program Kesehatan Nasional Penerapan pemahaman kesehatan di industri penerbangan membantu pelaksanaan program kesehatan nasional, termasuk pengendalian penyakit dan promosi gaya hidup sehat.



Grafik 3.3 Capaian Realisasi Pemahaman Kesehatan Penerbangan oleh Pengguna Jasa

Tabel realisasi indikator tersebut sepanjang tahun 2025 menunjukkan target tahunan sebesar 95% yang ditetapkan secara konsisten setiap bulan. Secara keseluruhan, capaian realisasi rata-rata mencapai 92,31%, dengan fluktuasi bulanan yang berada di kisaran 89,99% (terendah pada Agustus) hingga 94,96% (tertinggi pada Januari). Meskipun belum mencapai target 95% di seluruh bulan dengan seluruh 12 bulan berada di bawah ambang batas terdapat tren pemulihan pada beberapa periode kunci, seperti peningkatan signifikan pada April (93,91%), September (93,84%), dan Oktober (93,46%), yang mencerminkan keberhasilan intensifikasi program edukasi dan sosialisasi, khususnya menjelang periode operasional tinggi seperti mudik Lebaran dan akhir tahun.

Pada triwulan pertama, realisasi relatif stabil di atas 90%, dengan puncak awal tahun di Januari (94,96%) dan Februari (94,14%), menandakan momentum positif pasca-evaluasi tahun sebelumnya serta efektivitas kampanye awal tahun. Namun, penurunan terjadi pada Maret (90,69%) dan berlanjut ke Juni (90,07%) serta Agustus (89,99%) sebagai titik terendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman, keterbatasan akses komunikasi di daerah terpencil, atau prioritas pada kegiatan pemeriksaan dan pengujian kesehatan lainnya. Pemulihan bertahap terlihat pada paruh kedua tahun, dengan realisasi Desember mencapai 92,33%, mengindikasikan upaya percepatan penyuluhan dan pemanfaatan media digital serta kolaborasi dengan operator penerbangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu kesehatan penerbangan, seperti pencegahan penyakit akibat perjalanan udara, pentingnya sertifikat kesehatan personel, serta kesadaran terhadap faktor lingkungan kerja.

Secara keseluruhan, pencapaian rata-rata 92,31% ini menegaskan komitmen Balai Kesehatan Penerbangan dalam membangun kesadaran dan pemahaman kesehatan yang lebih baik di kalangan pengguna jasa, meskipun masih diperlukan penguatan strategi untuk menembus target 95%. Upaya ke depan mencakup optimalisasi kanal komunikasi berbasis teknologi, peningkatan frekuensi penyuluhan terintegrasi dengan kegiatan pemeriksaan narkoba dan pengujian lingkungan kerja, serta evaluasi berkala terhadap materi edukasi agar lebih relevan dan mudah dipahami. Dengan demikian, indikator ini terus menjadi instrumen penting dalam mendukung visi transportasi udara yang aman, sehat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan agenda nasional pembangunan sektor perhubungan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

E. Jumlah Peralatan Pengujian yang di kalibrasi

Secara operasional, indikator ini diukur berdasarkan jumlah unit peralatan yang berhasil dikalibrasi dalam periode tertentu (misalnya tahunan atau triwulanan), dengan target yang ditetapkan sesuai kapasitas laboratorium, anggaran, dan jadwal kalibrasi eksternal. Capaian indikator ini berkontribusi terhadap efisiensi pelayanan, pencegahan downtime peralatan, serta peningkatan kepercayaan stakeholder (maskapai, personel penerbangan, dan regulator) terhadap kualitas layanan Balai Kesehatan Penerbangan. Capaian indikaor ini konsisten di 100%.

2. Sasaran "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan"

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan"didukung oleh:

- Program Infrastruktur dalam bidang Teknologi Informasi, yang memudahkan pengguna jasa dalam melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Dalam melakukan pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan, pelayanan dilakukan secara *one day service*.

Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 4 (empat) indikator pendukung sasaran:

A. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Tabel 3.2 Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Januari s.d Juni

Bulan	Target	Realisasi
Januari	95%	95,33%
Februari	95%	95,13%
Maret	95%	94,88%
April	95%	94,89%
Mei	95%	95,12%
Juni	95%	95,14%
Juli	95%	95,14%
Agustus	95%	95,03%
September	95%	95,10
Oktober	95%	94,84
November	95%	95,25
Desember	95%	94,86

Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna jasa di sektor transportasi udara nasional, Balai Kesehatan Penerbangan (BKP) menerapkan indikator kinerja utama "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa" sebagai ukuran langsung terhadap persepsi dan tingkat kepuasan stakeholder—termasuk personel penerbangan, operator maskapai, awak pesawat, serta masyarakat pengguna layanan kesehatan penerbangan—terhadap pelayanan yang diberikan, seperti pemeriksaan kesehatan, pengujian narkoba, pengujian lingkungan kerja, kalibrasi peralatan, serta edukasi dan penyuluhan kesehatan.

Tabel realisasi indeks kepuasan pengguna jasa sepanjang tahun 2025 menunjukkan target bulanan yang ditetapkan secara konsisten sebesar 95%. Secara keseluruhan, capaian realisasi rata-rata mencapai 95,06%, yang berarti Balai Kesehatan Penerbangan berhasil melampaui target rata-rata tahunan dengan selisih positif sekitar 0,06 poin persentase. Dari 12 bulan, terdapat 8 bulan yang berhasil mencapai atau melampaui target 95%, sementara 4 bulan berada sedikit di bawah ambang batas tersebut.

Pada triwulan pertama, performa relatif kuat dengan puncak tertinggi di Januari sebesar 95,33%, diikuti Februari (95,13%) dan Maret (94,88%). Tren ini mencerminkan momentum positif awal tahun, kemungkinan didorong oleh evaluasi layanan tahun sebelumnya serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna jasa pasca-libur akhir tahun. Memasuki kuartal kedua, realisasi tetap stabil di atas atau mendekati target, dengan April (94,89%), Mei (95,12%), Juni (95,14%), dan Juli

(95,14%) menunjukkan konsistensi tinggi, yang mengindikasikan keberhasilan optimalisasi proses pelayanan, termasuk digitalisasi prosedur dan peningkatan koordinasi dengan stakeholder.

Pada paruh kedua tahun, capaian tetap terjaga dengan baik: Agustus (95,03%), September (95,10%), dan November (95,25%) berhasil melampaui target, sementara Oktober (94,84% sebagai titik terendah) dan Desember (94,86%) sedikit di bawah 95%. Penurunan minor pada dua bulan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman seperti lonjakan permintaan layanan menjelang akhir tahun, libur nasional, atau penyesuaian operasional, namun tetap berada dalam rentang yang sangat baik dan tidak signifikan mengganggu tren keseluruhan.

Secara keseluruhan, pencapaian rata-rata 95,06% ini menegaskan komitmen Balai Kesehatan Penerbangan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa.

Capaian ini mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kepuasan masyarakat terhadap transportasi udara, sejalan dengan prinsip good governance dan reformasi birokrasi. Ke depan, penguatan survei kepuasan secara berkala, pemanfaatan umpan balik pengguna untuk perbaikan berkelanjutan, serta integrasi teknologi dalam pengumpulan data akan terus diupayakan guna mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini, demi terwujudnya layanan kesehatan penerbangan yang prima, aman, dan mendukung konektivitas udara nasional yang handal menuju Indonesia Emas 2045.

B. Keluhan Pengguna Jasa yang ditindaklanjuti

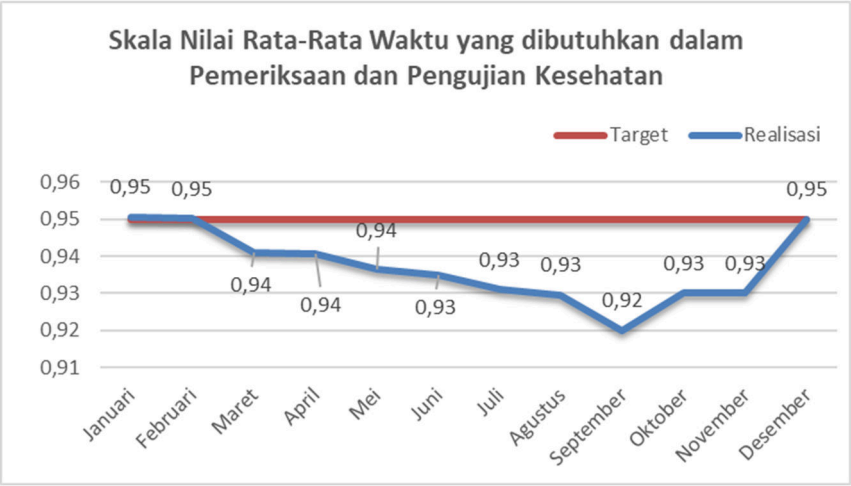
Indikator Keluhan Pengguna Jasa yang ditindaklanjuti ini, berfungsi sebagai jembatan antara kualitas pelayanan internal Balai Kesehatan Penerbangan dengan kepuasan serta keselamatan pengguna jasa (personil penerbangan). Secara garis besar, fungsi indikator ini terbagi menjadi empat area utama yaitu:

1) Alat Ukur Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Standar Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur langsung seberapa efektif dan responsif Balai Kesehatan Penerbangan dalam menjalankan tugasnya.

2) Mengukur Responsivitas, Menunjukkan kecepatan dan ketepatan Balai Kesehatan Penerbangan dalam merespons setiap keluhan yang masuk. Keluhan tidak hanya dicatat, tetapi harus diselesaikan.
3) Deteksi Cepat Masalah Internal. Keluhan pelanggan seringkali adalah gejala dari masalah sistemik, seperti prosedur yang rumit, waktu tunggu yang lama, atau miskomunikasi hasil pemeriksaan. Persentase tinggi keluhan yang ditindaklanjuti menandakan kemampuan Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengatasi kelemahan internalnya.
4) Indikator ini membantu manajemen mengidentifikasi unit atau prosedur mana yang paling sering dikeluhkan dan membutuhkan perhatian mendesak, baik itu dari sisi SDM, teknologi, maupun prosedur.
5) Evaluasi Kinerja Staf. Persentase keluhan yang ditindaklanjuti dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf dan tim yang bertanggung jawab atas layanan pelanggan dan proses pemeriksaan medis.

Realisasi indikator keluhan pengguna jasa yang ditindaklanjuti pada triwulan 2 konsisten di capaian 100%, Balai Kesehatan Penerbangan selalu merespon terhadap semua keluhan yang masuk hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap kualitas layanan di Balai Kesehatan Penerbangan.

C. Skala Nilai Rata-Rata Waktu yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan



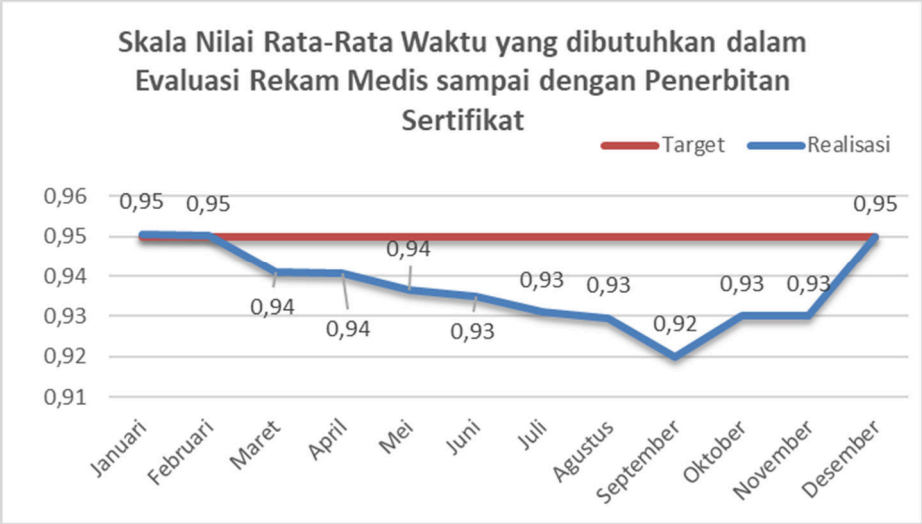
Grafik 3.4 Realisasi Rata-rata Waktu yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan

Berdasarkan grafik di atas skala rata rata waktu dalam pemeriksaan Kesehatan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 memiliki kecenderungan menurun dari bulan Januari hingga Desember 2025.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1) Adanya gangguan jaringan pada sistem informasi layanan medex, sehingga pada saat memasukan hasil pemeriksaan menjadi lebih lambat.
2) Sistem antrian elektronik terganggu akibat adanya gangguan jaringan

D. Skala Nilai Rata-Rata Waktu yang dibutuhkan dalam Evaluasi Rekam Medis sampai dengan Penerbitan Sertifikat.



Grafik 3.5 Skala Nilai Rata-Rata Waktu yang dibutuhkan dalam Evaluasi Rekam Medis sampai dengan Penerbitan Sertifikat

Indikator skala nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam evaluasi rekam medis sampai dengan penerbitan sertifikat, adalah perhitungan bagaimana tenaga professional Balai Kesehatan Penerbangan memberikan pernyataan bahwa para pengguna jasa yang melakukan pemeriksaan Kesehatan mendapatkan hasil fit atau unfit setelah melakukan serangkaian pemeriksaan. Capaian ini dipengaruhi oleh sumber daya yang mencakup tenaga professional serta pengelolaan tekhnologi informasi yang menjadikan waktu pelayanan pemeriksaan di Balai Kesehatan Penerbangan menerapkan konsep *One Day Service*.

3. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Balai KesehatanPenerbangan.**

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik pada Balai Kesehatan Penerbangan" menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan.

Berikut faktor-faktor utama yang mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Balai Kesehatan Penerbangan:

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran yang Akuntabel
   - Penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, seperti Renstra, RBA, dan PK (Perjanjian Kinerja) yang selaras dengan visi misi Kementerian Perhubungan dan RPJMN.
   - Penerapan prinsip value for money dalam penggunaan anggaran: efisien, efektif, dan ekonomis.
   - Integrasi sistem perencanaan dan pelaporan melalui aplikasi seperti SAKTI, e-Monev, dan lain-lain.
2. Aspek Pengawasan dan Akuntabilitas
   - Pelaksanaan pengendalian internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
   - Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal secara konsisten.
   - Budaya kerja berintegritas dan bebas dari korupsi (WBK/WBBM).
3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
   - Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional.
   - Penerapan manajemen kinerja pegawai berbasis e-Kinerja.
   - Penegakan disiplin ASN dan penerapan reward & punishment yang objektif.

Indikator yang termasuk ke dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola:

A. Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Kesehatan Penerbangan didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) untuk memastikan kecukupan dan kualitas personel yang dibutuhkan untuk menjamin keselamatan penerbangan. Balai Kesehatan Penerbangan, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan, memiliki kebutuhan SDM yang sangat spesialisasi.

Strategi Pemenuhan SDM di Balai Hatpen, sesuai dengan pedoman kepegawaian pemerintah, dilakukan melalui beberapa strategi utama:

1. Perencanaan Kebutuhan (Formasi)
   - Analisis Beban Kerja (ABK): Digunakan untuk menghitung mlah ideal setiap jenis jabatan berdasarkan volume pemeriksaan, norma waktu, dan waktu kerja efektif.Contoh: Menghitung berapa banyak AME yang dibutuhkan untuk memeriksa jumlah pilot per tahun.
   - Analisis Jabatan (Anjab): Digunakan untuk menentukan spesifikasi kualifikasi, pendidikan, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pegawai (misalnya, Dokter Sp.KP harus memiliki sertifikasi dari lembaga berwenang).
   - Penetapan Formasi: Hasil dari ABK dan Anjab menjadi dasar pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Kementerian PANRB.
2. Pengadaan dan Rekrutmen
   - Seleksi CASN (PNS/PPPK): Pengadaan harus memprioritaskan jabatan fungsional kesehatan penerbangan yang sangat spesifik. Persyaratan kualifikasi harus ketat sesuai dengan tuntutan keselamatan penerbangan.
   - Kerja Sama Pendidikan: Balai Hatpen dapat menjalin kerja sama dengan Fakultas Kedokteran atau institusi pelatihan untuk menciptakan kader Dokter dan Paramedis Penerbangan.
3. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi
   - Pelatihan dan Sertifikasi Berkelanjutan: Mengingat regulasi penerbangan yang terus berkembang, SDM diwajibkan mengikuti pelatihan dan resertifikasi periodik (misalnya, *refresher training* bagi AME).
   - Program Beasiswa: Mengirim staf medis untuk mengambil pendidikan spesialisasi Kedokteran Penerbangan untuk mengisi jabatan strategis.
   - Optimalisasi SDM Internal (Mutasi/Promosi)
   - Melakukan mutasi atau promosi pegawai yang ada berdasarkan evaluasi kinerja dan kesesuaian kualifikasi (hasil Anjab) untuk mengisi kekurangan di unit kerja tertentu, terutama di bagian yang mengalami *overload* beban kerja.

Dengan pemenuhan SDM yang akurat, Balai Kesehatan Penerbangan dapat memastikan bahwa setiap personel penerbangan diperiksa dengan standar tertinggi, yang merupakan pilar utama dari keselamatan penerbangan. Capaian Pemenuhan Sumber Daya Manusia di Balai Kesehatan Penerbangan mencapai 100%.

B. Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan

Sumber daya manusia adalah sumber kekuatan Balai Kesehatan Penerbangan ,adanya dokter spesialis yang berasal dari pegawai Balai Kesehatan Penerbangan merupakan asset yang sangat penting, Balai Kesehatan Penerbangan memiliki program pengembangan SDM melalui Pendidikan non formal serta memiliki program Pendidikan berkelanjutan untuk pegawai melalui in house dan out house training, seminar dan symposium.

Capaian indikator Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah 100%.

C. Jumlah Pendapatan BLU



Grafik 3.6 Jumlah Pendapatan BLU Tahun 2025

Total pendapatan kumulatif hingga Desember mencapai Rp.41.964.045.194. Grafik menunjukkan pola fluktuatif yang signifikan, dengan puncak tertinggi pada Februari (Rp4.447 miliar) dan Maret (Rp4.142 miliar), diikuti penurunan tajam pada April (Rp2.565 miliar), kemudian pemulihan bertahap pada Mei hingga Oktober (dengan lonjakan kembali di Oktober Rp3.903 miliar), serta stabilisasi menjelang akhir tahun.

Pencapaian ini menegaskan komitmen Balai Kesehatan Penerbangan dalam mengelola keuangan BLU secara transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung sasaran strategis peningkatan keselamatan transportasi udara melalui pendanaan mandiri yang lebih kuat. Variasi bulanan menyoroti perlunya penguatan strategi pemasaran layanan, diversifikasi sumber pendapatan, serta monitoring ketat terhadap faktor eksternal seperti pertumbuhan trafik penerbangan dan kepatuhan tarif. Ke depan, upaya percepatan transformasi BLU termasuk peningkatan efisiensi operasional, inovasi tarif, dan kolaborasi lintas stakeholder akan terus diintensifkan guna mencapai target pendapatan yang lebih optimal pada periode berikutnya, demi memperkuat kontribusi sektor kesehatan penerbangan terhadap pembangunan transportasi udara nasional yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas.

D. Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO).

Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional adalah salah satu indikator yang menerapkan fungsi efisiensi dalam melaksanakan anggaran. Rasio POBO adalah salah satu rasio efisiensi utama dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu entitas (misalnya, perusahaan, Badan Layanan Umum - BLU) dalam menutup atau melebihi beban operasionalnya hanya dengan menggunakan pendapatan dari kegiatan operasional utama. Pada akhir periode tahun anggaran 2025 Rasio POBO berada di angka 84,4% dari target sebesar 85%. Capaian ini berada sangat dekat dengan target (hanya selisih 0,6 poin persentase di bawah), yang menandakan performa keuangan operasional BLU Balai Kesehatan Penerbangan masih dalam kategori baik dan hampir mencapai sasaran.

3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Balai Kesehatan Penerbangan mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp 69.877.695.000, namun selama triwulan 4 terdapat 11 (sebelas) kali perubahan/revisi. Pada akhir tahun 2025 pagu anggaran sebesar 73.137.181.000, Guna peningkatan kualitas layanan pada tahun 2025, Balai Kesehatan Penerbangan melakukan pembelian alat kesehatan yaitu alat *panoramic* dengan nilai Rp. 3.123.540.000.

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Rp 16.520.123.000;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara Rp1.434.320.000;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum sebesar Rp.44.751.756.000,-;
4. Pengelolaan Organisasi Dan SDM sebesar Rp. 3.877.974.000,-.
5. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama sebesar Rp. 1.355.100.000,-.

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2025 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\sum_{j=1}^{2} RA\ bulan\ ke-j}{\sum_{j=1}^{2} RPD\ bulan\ ke-j}\ X\ 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025

No.	Bulan	RPD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Tingkat Penyerapan
1	Januari	10.782.383.455	654.158.887	10.782.383.455	654.158.887	6,07%
2	Februari	2.544.365.407	2.979.245.922	13.326.748.862	3.633.404.809	117,09%
3	Maret	2.704.813.435	3.438.822.641	16.031.562.297	7.072.227.450	127,14%
4	April	3.601.390.753	4.470.955.178	19.632.953.050	11.543.182.628	124,15%
5	Mei	2.932.419.499	3.316.752.301	22.565.372.549	14.859.934.929	113,11%
6	Juni	2.723.963.467	3.644.133.627	25.289.336.016	18.504.068.556	133,78%
7	Juli	3.780.535.037	4.765.232.714	29.069.871.053	23.269.301.270	126,05%
8	Agustus	4.492.315.855	4.237.356.949	33.562.186.908	27.506.658.219	94,32%
9	September	5.642.840.182	5.294.308.802	39.205.027.090	32.800.967.021	93,82%
10	Oktober	7.004.671.201	4.300.119.679	46.209.698.291	37.101.086.700	61,39%
11	November	8.811.323.104	4.806.915.456	55.021.021.395	41.908.002.156	54,55%
12	Desember	18.116.159.605	12.515.292.298	73.137.181.000	54.423.294.454	69,08%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\sum_{j=1}^{i} RAbulankej}{\sum_{j=1}^{i} RPDbulanke\ j} x100\%\right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

K = (6,07+117,09+127,14+124,15+113,11+133,78+126,05+94,32+93,82+61,39 +54,55+69,08) x 100% : 12
= 93,38%

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2025 sebesar 93,38%.

Tabel 3.4 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	2025			PAGU	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN	RAK/RVK	PAK/TVK	AB	(1-A/B) x 100%
				TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN							
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara	1	Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan yang diterbitkan	Persentase	100%	83,92%	83,92%	11.549.676.410	9.252.105.262	80,11%	9.252.105.262	11.549.676.410	0,80	19,89%
	2	Personil Penerbangan yang dilakukan Pengujian Narkoba di daerah lingkungan kerja	Persentase	100%	150,66%	150,66%	3.396.963.650	2.721.207.430	80,11%	2.721.207.430	3.396.963.650	0,80	19,89%
	3	Pengujian lingkungan kerja personel penerbangan di lingkungan kerja	Persentase	100%	100,00%	100,00%	679.392.730	544.241.486	80,11%	544.241.486	679.392.730	0,80	19,89%
	4	Pemahaman kesehatan penerbangan oleh pengguna jasa	Persentase	95%	92,64%	97,51%	3.396.963.650	2.721.207.430	80,11%	2.864.428.874	3.575.751.211	0,80	19,89%
	5	Jumlah peralatan pengujian yang dikalibrasi	Persentase	100%	100,00%	100,00%	4.076.356.380	3.265.448.916	80,11%	3.265.448.916	4.076.356.380	0,80	19,89%
Rata-Rata Capaian Sasaran				106,42%									
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan	1	Indeks kepuasan pengguna jasa	Persentase	94%	94,86%	100,91%	6.114.534.570	4.898.173.374	80,11%	5.210.822.738	6.504.824.011	0,80	19,89%
	2	Keluhan pengguna jasa yang ditindak lanjuti	Persentase	100%	100,00%	100,00%	4.076.356.380	3.265.448.916	80,11%	3.265.448.916	4.076.356.380	0,80	19,89%

	3	Skala nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pengujian kesehatan	Skala	0,95	0,94	98,60%	1.358.785.460	1.088.482.972	80,11%	1.145.771.549	1.430.300.484	0,80	19,89%
	4	Skala nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam evaluasi rekam medis sampai dengan penerbitan sertifikat	Skala	0,95	0,94	98,60%	679.392.730	544.241.486	80,11%	572.885.775	715.150.242	0,80	19,89%
Rata-Rata Capaian Sasaran				99,53%									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan	1	Pemenuhan sumber daya manusia	Persentase	100%	100%	100,00%	2.038.178.190	1.632.724.458	80,11%	1.632.724.458	2.038.178.190	0,80	19,89%
	2	Sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	100%	100%	100,00%	3.396.963.650	2.721.207.430	80,11%	2.721.207.430	3.396.963.650	0,80	19,89%
	3	Jumlah pendapatan BLU	Rupiah	45.312.830.000	41.964.045.194	92,61%	12.908.461.870	10.340.588.234	80,11%	108.086.006	129.084.619	0,84	16,27%
	4	Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	Persentase	85%	84,40%	99,29%	14.267.247.330	11.429.071.206	80,11%	13.445.966.124	16.784.996.859	0,80	19,89%
Rata-Rata Capaian Sasaran				97,98%									254,98%
CAPAIAN RATA-RATA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN				101,31%									

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{RAKkei / RVKkei}{PAKkei / TVKkei}\right) x100\%}{n} = 19{,}61\%$$

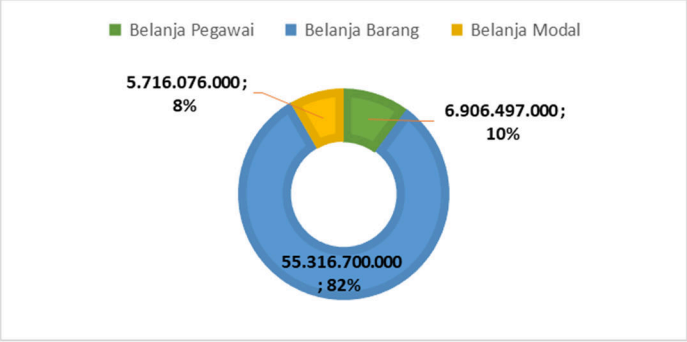
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} x50\right) = 50\% + \left(\frac{19{,}61\%}{20} \text{ x } 50\%\right)$$

$$= 50\% + 0{,}49\% = 50{,}49\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada akhir Tahun 2025 sebesar 19,61% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50,49% yang menunjukkan kategori efisiensi yang baik.

3.3 Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 dengan pagu efektif sebesar Rp. 67.939.273.000 -, berdasarkan perhitungan manual sebesar Rp 54.424.148.598,- atau 80,10 %. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.8 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Jenis Belanja

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2025

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%
RM	21.527.924.000	14.928.947.096	69,35%
BLU	43.211.349.000	36.371.661.502	84,17%

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran pada tahun 2025 mencapai tingkat yang cukup baik secara keseluruhan, dengan total anggaran sebesar Rp67.939.273.000 dan realisasi Rp54.424.148.598, atau setara dengan 80,11%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 80% dari alokasi dana telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan operasional, pengadaan aset, dan kompensasi pegawai. Komposisi anggaran didominasi oleh belanja barang (82% atau Rp55.316.700.000), diikuti belanja modal (10% atau Rp6.906.497.000) yang sebagian besar bersumber dari BLU, dan belanja pegawai (8% atau Rp5.716.076.000). Khusus untuk belanja modal dari BLU, terdapat alokasi tambahan Rp3.200.000.000 dengan realisasi yang sangat tinggi mencapai Rp3.123.540.000 (97,61%), yang menandakan efisiensi dalam pengadaan aset jangka panjang seperti peralatan atau infrastruktur.

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran ini menunjukkan progres positif, terutama pada aspek operasional (belanja barang) dan investasi (belanja modal BLU), yang berkontribusi pada pencapaian target layanan publik atau organisasi. Namun, ketimpangan antara RM dan BLU menjadi catatan penting, karena risiko sisa anggaran pada RM bisa berdampak pada evaluasi kinerja dan potensi pengurangan alokasi di masa depan. Dengan asumsi ini adalah data akhir tahun 2025, tingkat penyerapan 80% sudah di atas ambang batas minimal yang sering ditargetkan pemerintah (sekitar 75-80% untuk triwulan IV), tetapi masih ada ruang optimalisasi untuk menghindari pemborosan atau inefisiensi.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Balai Kesehatan Penerbangan untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan sehingga berpotensi mengalami keterlambatan maupun tidak selesai sampai dengan periode akhir tahun anggaran.
2. Meningkatkan penerimaan PNBP agar tercipta rasio POBO yang optimal;
3. Realokasi anggaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang belum dilelangkan dan dimungkinkan terlambat pada perioda triwulan II untuk kegiatan yang lebih membutuhkan dan dimungkinkan percepatan dalam pelaksanaannya;

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 Balai Kesehatan Penerbangan, penyerapan anggaran mencapai tingkat yang cukup baik secara keseluruhan, dengan total anggaran sebesar Rp67.939.273.000 dan realisasi Rp54.424.148.598, atau setara dengan 80,11%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 80% dari alokasi dana telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan operasional, pengadaan aset, dan kompensasi pegawai. Komposisi anggaran didominasi oleh belanja barang (82% atau Rp55.316.700.000), diikuti belanja modal (10% atau Rp6.906.497.000) yang sebagian besar bersumber dari BLU, dan belanja pegawai (8% atau Rp5.716.076.000). Khusus untuk belanja modal dari BLU, terdapat alokasi tambahan melalui penggunaan saldo awal sebesar Rp3.200.000.000 dengan realisasi yang sangat tinggi mencapai Rp3.123.540.000 (97,61%), yang menandakan efisiensi dalam pengadaan aset jangka panjang seperti peralatan atau infrastruktur.

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran ini menunjukkan progres positif, terutama pada aspek operasional (belanja barang) dan investasi (belanja modal BLU), yang berkontribusi pada pencapaian target layanan publik atau organisasi. Namun, ketimpangan antara RM dan BLU menjadi catatan penting, karena risiko sisa anggaran pada RM bisa berdampak pada evaluasi kinerja dan potensi pengurangan alokasi di masa depan. Dengan asumsi ini adalah data akhir tahun 2025, tingkat penyerapan 80% sudah di atas ambang batas minimal yang sering ditargetkan pemerintah (sekitar 75-80% untuk triwulan IV), tetapi masih ada ruang optimalisasi untuk menghindari inefisiensi.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun langkah-langkah strategis yang direkomendasikan untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kesehatan bagi pengguna jasa agar pemahaman terhadap kesehatan penerbangan meningkat.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, melalui pelatihan berkelanjutan.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset dan teknologi informasi guna mempercepat pelayanan dan efisiensi operasional BLU.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap serapan anggaran serta pelaksanaan kegiatan agar capaian target dapat maksimal.